

Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Ika Widiastuti¹, Pandu Adi Cakranegara²

¹ Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

² Universitas Presiden, Indonesia

Corresponding Author:  iwidiastuti86@gmail.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Agustus 27,
2023

Revised

September 14,
2023

Accepted

November 20,
2023

The implementation process of educational policies consists of three crucial stages: foundation, formulation, and execution within the community. Formulation is a pivotal phase in the creation of educational policies, and a significant challenge lies in the meticulousness of policy formulation. The importance of policy evaluation in education is paramount, serving as a tool to measure the quality of policy outcomes and provide recommendations to relevant stakeholders. This research aims to explore and discuss the evaluation of educational policies in Indonesia, utilizing a qualitative descriptive methodology. The conclusion of the study emphasizes the need to process and analyze information regarding implemented policies. The implication of the research underscores the critical role of evaluation in determining the efficacy of policies, identifying strengths and weaknesses, assessing the extent of policy implementation, understanding the impact of executed policies, and determining the necessary steps for potential policy adjustments or improvements.

Keywords: Evaluation, Policy, Education in Indonesia

How to cite

Ika Widiastuti, Pandu Adi Cakranegara., (2023). Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Attractive : Innovative Education Journal*, 5(3). 480-486.

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan aktivitas untuk mengetahui kebijakan pendidikan sesuai terhadap kriteria yang sudah ditentukan. Didalam prosesnya implementasi analisis kebijakan pendidikan, supaya dipahami apakah kebijakan terselenggara secara baik atau sebaliknya, dengan adanya perubahan atau perbaikan dan mengetahui kekurangan atau kelebihan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan dapat menimbulkan dampak, kegaduhan, kerugian serta lainnya. Proses evaluasi adalah fase akhir suatu proses penyusunan kebijakan supaya dapat menyempurnakan kebijakan pendidikan. Perubahan kepada kebijakan pendidikan harus dijalankan dengan penilaian (evaluasi).

Dengan mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah instrumen yang terpenting didalam kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan yang telah berjalan ataupun yang belum berjalan (Supandi, 1988). Kebijakan pendidikan merupakan unsur kebijakan publik yang tidak dapat terlepas dengan sendirinya tanpa adanya sebuah evaluasi. Evaluasi kebijakan pendidikan yang dijalankan dalam menilai keefektifan serta wujud pertanggungjawaban pada pelaksanaan pendidikan pada publik untuk mewujudkan

tujuan pendidikan yang sudah ditentukan guna mengukur tingkat perbedaan diantara harapan serta realita. Evaluasi kebijakan pendidikan supaya dapat jadi sarana dalam menghimpun informasi tentang program atau pelayanan pendidikan, untuk menetapkan saran untuk perbaikan yang dibutuhkan guna penerapan kebijakan pendidikan terselenggara efektif sesuai standar yang ditentukan (Hasbullah:2015).

Evaluasi kebijakan pendidikan adalah sebuah proses atau kegiatan yang dijalankan dengan berurutan, serta merupakan tahapan terakhir didalam proses analisis kebijakan (Islamy, 1994: Winarno, 2008). Akan tetapi, beberapa pakar menyatakan evaluasi kebijakan pendidikan bukan fase terakhir proses kebijakan, dapat dijalankan ditengah proses analisis. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan evaluasi kebijakan pendidikan yaitu proses dalam menilai kebijakan pendidikan memberikan hasil dengan membandingkan diantara hasil yang didapat terhadap tujuan serta target kebijakan yang sudah ditetapkan.

Permasalahan kebijakan yaitu belum telitinya perumusan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi kebijakan pendidikan. Pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan yaitu untuk mengukur kualitas hasil kebijakan dan memberikan saran kepada para pihak didalamnya sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan membahas evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia

METODE

Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan melakukan kajian pustaka. Menurut McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015), metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa (what)”, “bagaimana (how)”, atau “mengapa (why)” atas suatu fenomena. Metode penelitian kualitatif lebih mengupayakan dalam menyelidiki masalah. Dari masalah yang ada tersebut akan menjadi dasar yang digunakan oleh peneliti dalam mengambil data. Kemudian peneliti menentukan variabel dan diukur dengan angka guna analisa yang sesuai dengan prosedur dari statistik yang berlaku. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan mempelajari teori-teori, peraturan-peraturan, informasi yang diperoleh dari jurnal, buku teks dan makalah yang berkaitan dengan masalah penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi berkaitan terhadap hasil informasi tentang manfaat hasil kebijakan yang memiliki nilai. Evaluasi merupakan aktivitas guna mengetahui program yang sudah berjalan maupun belum berjalan serta telah berhasil atau belum sesuai harapan. Menurut Supandi, evaluasi yakni usaha menganalisa nilai dari fakta suatu kebijakan yang ada dan membuktikan fakta yang memiliki nilai atau tidak apabila dibandingkan terhadap standar yang sudah ditetapkan. Jones mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah sebuah kegiatan yang disusun supaya menilai hasil dari program pemerintah menggunakan teknik pengukuran, metode analisis serta objeknya.

Menurut Stufflebeam, evaluasi artinya sebuah proses pencarian, penggambaran serta pemberian informasi bermanfaat untuk menentukan sebuah alternatif keputusan sedangkan menurut Anderson, evaluasi yakni proses yang menentukan hasil untuk tercapainya sebuah tujuan. Menurut Suharto, kebijakan yakni ketetapan mengarahkan untuk berbuat yang telah dibuat dengan terstruktur demi meraih tujuan.

Kesimpulannya evaluasi yakni kegiatan yang dapat dilakukan dalam menilai serta mengukur suatu program dari seluruh aspek agar dapat mengetahui apakah didalam program tersebut telah terlaksana atau belum, dengan perencanaan serta harapan yang sesuai. Sedangkan evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap hasil sebuah program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian pengertian evaluasi kebijakan pendidikan adalah penilaian serta pengukuran terhadap program pemerintah yang telah terfokus didalam seluruh aspek kependidikan.

Evaluasi kebijakan pendidikan dapat mengetahui semua kebijakan pendidikan yang dilaksanakan serta dapat mendapat manfaat yang ingin dicapai. Evaluasi kebijakan pendidikan dapat ditentukan yakni:

1. Administratif, untuk mengukur dalam prosedur kebijakan pendidikan secara administratif, umumnya lebih kepada bidang keuangan.
2. Politik, untuk mengukur pertimbangan dalam politik dari kebijakan pendidikan.
3. Yudisial, adalah dalam mengukur semua objek hukum, yang telah dilanggar atau tidak dilanggar (Putra: 2012).

Evaluasi kebijakan pendidikan menurut Subarsono (2010,120) menyatakan bahwasanya evaluasi kebijakan pendidikan mempunyai sejumlah tujuan.

1. Untuk mengukur seberapa tingkat efisiensi suatu kebijakan
2. Untuk menentukan seberapa tingkat kinerja sebuah kebijakan.

Hambatan evaluasi kebijakan pendidikan yaitu

- a. Kurangnya ketersediaan sumber daya evaluasi serta *evaluator* kebijakan pendidikan
- b. Kendala *politic* yaitu selalu terbentur karena ada *bargaining* dan *deal* politik.
- c. Masih kurangnya data serta informasi yang terbaru.
- d. Ongkos bagi para staf administrasi serta bagi *evaluator*.
- e. Dalam kendala psikologis aktor yang menjadi pelaksana kegiatan telah memandang bahwa evaluasi kebijakan pendidikan sebagai hasil prestasi dari dirinya.
- f. Memiliki pandangan yang tidak sama dalam solusi masalah kebijakan.
- g. Perkembangan masyarakat yang menyulitkan evaluasi kebijakan pendidikan sehingga memunculkan masalah yang kompleks.
- h. Tujuan kebijakan pendidikan yang tidak jelas karena kompromi yang dipaksa oleh pembuat kebijakan.

Kelompok sasaran yang harus diperhatikan yaitu program walaupun berakibat secara menyeluruh dalam populasi sasaran. Akan tetapi tidak semua mempunyai dampak pada kelompok sasaran. Namun sering terjadi bukan pada kelompok target yang mendapat manfaat akan kebijakan itu, namun kelompok lain pada populasi itu yang terkadang diakibatkan oleh *bias biokrasi* (Ali, M. 2017).

Manfaat evaluasi kebijakan pendidikan bersifat internal yaitu:

1. Dapat mengetahui efektifitas sebuah kebijakan dengan penilaian.
2. Dapat mengetahui sebuah kebijakan yang dilaksanakan supaya memperoleh informasi yang akurat serta objektif.

3. Dapat menghindari pengulangan pada kesalahan dalam informasi dari evaluasi kebijakan (Hogwood and Peter, 1985).

Manfaat dari evaluasi kebijakan pendidikan bersifat eksternal yaitu:

1. Dapat mensosialisasikan manfaat kebijakan terutama pada kelompok sasaran serta penerima secara terukur.
2. Dapat memenuhi prinsip yang akuntabilitas publik, merupakan penilaian yang dimana kinerja terhadap kebijakan yang sudah ditentukan adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari pengambilan kebijakan terhadap public. Evaluasi kebijakan pendidikan telah menghadirkan manfaat yang optimal dan sejumlah hal yang baik yang butuh diperhatikan: 1. Political feasibility. 2. Social acceptability. 3. Administrative feasibility. 4. Effectiveness. 5. Practical Considerations. 6. Liberty/freedom. 7. Security. 8. Equity/equality. 9. Efficiency. 10. Goals/values (Yuyanshi, 2016).

Di dalam memonitoring yaitu menganalisis kemudian hasil dari analisis diinterpretasikan serta didefinisikan selaku masukan bagi para pemimpin agar melakukan perbaikan (Kemendikbud, 2013). Monitoring adalah prosedur kebijakan pendidikan yang digunakan dapat menghasilkan informasi terkait sebab akibat keputusan yang dapat mencerminkan antara hubungan pelaksanaan program kebijakan atau outcome terhadap sumber daya pokoknya merupakan wawasan mengenai pelaksanaan kebijakan. Pimpinan melakukan monitoring guna melihat serta memonitoring jalannya organisasi sepanjang berlangsungnya kegiatan serta menilai perwujudan dari tujuan, dengan melihat faktor penunjang serta penghambat pelaksanaan program.

Monitoring berfungsi sebagai a. penjelasan dapat menghasilkan informasi untuk menerangkan bagaimana dampak dari kebijakan. b. laporan dapat menciptakan informasi yang mampu untuk menghitung hasil dari perubahan sosial pada masyarakat sebagai akibat pelaksanaan kebijakan suatu jangka waktu tertentu. c. pemeriksaan merupakan cara untuk menetapkan apakah layanan dan sumber dari pendidikan yang telah diberikansudah mencapai sasaran dan target. d. ketaatan dapat menentukan tindakan administrator semua staf yang terlibat dalam mengikuti standar serta prosedur yangtelah ditentukan (Wibawa, 1994: Wiliam N. Dunn, 2003).

Prinsip memonitoring dilaksanakan setelah kegiatan berlangsung untuk memastikan keselarasan proses dalam mencapai target. Oleh karena itu monitoring harus dijalankan secara baik untuk memastikan dalam penerapan kebijakan pendidikan apakah sesuai terhadap pedoman serta penyusunan program serta dapat memberikan sebuah informasi apabila terdapat hambatan atau penyimpangan dalam mengadakan evaluasi.

Evaluasi kebijakan pendidikan menurut William N Dunn (2003) terdiri dari a. daya guna, menyediakan informasi yang dapat dimengerti serta dapat digunakan oleh pengambil keputusan serta pelaku dalam kebijakan lainnya. b. Ketepatan waktu, evaluasi harus dapat membuat informasi tersedia dalam waktu yang telah ditetapkan. c. obyektifitas, evaluasi dapat dilaporkan melalui kesimpulan serta informasi penunjang, d. relisabilitas, disini evaluasi harus bermuatan serta teliti. e. validitas, evaluasi dapat memberikan pertimbangan secara persuasif serta seimbang dalam sebuah program atau kebijakan. f. signifikan, evaluasi ketika memberikan informasi yang penting g. relevansi, evaluasi memberikan informasi relevan dengan semua kebutuhan dalam penentuan keputusan kebijakan yang lainnya (William N Dunn,2003).

Menurut William N Dunn (2003) evaluasi kebijakan pendidikan yang baik yaitu:

- a. ketepatan dari hasil yang telah didapat bermanfaat dari evaluasi pendidikan yang telah dijalankan.
- b. responsivitas, hasil kebijakan pendidikan dapat berisikan preferensi dan nilai kelompok tersebut.
- c. pemerataan, evaluasi biaya serta manfaat dari layanan pendidikan tersebut sudah didistribusikan dengan merata terhadap semua kelompok masyarakat yang berbeda.
- d. kecukupan, melihat sejauh mana hasil yang sudah tercapai yang bisa menyelesaikan masalah pendidikan yang di evaluasi.
- d. efektifitas, hasil yang diinginkan sudah tercapai (Subarsono, 2013).

Model evaluasi kebijakan pendidikan dapat menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik. Model untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan yakni:

- a. *discrepancy model*, yang dipopulerkan oleh Provus.
- b. *CIIP evaluation model* yang dipopulerkan oleh Stufflebeam.
- c. *CSE-UCLA evaluation model*, yang memfokuskan “kapan” evaluasi akan diadakan.
- d. *responsive evaluation model*, yang dikembangkan Stake.
- e. *countenance evaluation model*, yang dikembangkan Stake.
- f. *formatif-sumatif evaluation model*, yang dikembangkan Michael Scriven.
- g. *goal oriented evaluasi model*, yang dikembangkan Tyler.
- h. *goal free evaluation model*, yang dikembangkan oleh Scriven (Kaufman serta Thomas pada Arikunto dan Cepi Safruddin, 2007).

Pendekatan model evaluasi kebijakan pendidikan yaitu

- a. evaluasi formal, merupakan pendekatan yang dapat dipakai dalam kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan dengan memakai metode deskriptif supaya menciptakan informasi yang valid serta terpercaya.
- b. evaluasi keputusan teoritis, informasi pendidikan yang dipercaya dan valid berkenaan hasil dari kebijakan pendidikan
- c. evaluasi semu, ukuran nilai dan manfaat yang telah terbukti (William N Dunn, 2003: 612-634).

Langkah evaluasi kebijakan pendidikan yang dapat diterapkan yaitu

- a. dampak kegiatan evaluasi atau sebab pemicu dari faktor yang lain.
- b. pengukuran perubahan tingkatan dari evaluasi pendidikan.
- c. deskripsi dan standarisasi dalam kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan.
- d. target evaluasi pendidikan.
- e. target untuk perubahan kebijakan pendidikan.
- f. hakikat serta tujuan evaluasi pendidikan (Edward A. Schuman dalam Budi Winarno, 2012).

Dampak evaluasi kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan apabila program serta proses evaluasi kebijakan pendidikan yang sudah dijalankan serta sesuai waktu yang telah direncanakan. Kebijakan pendidikan dapat diketahui dampak apabila telah diterapkan kepada masyarakat.

Dimensi dampak evaluasi kebijakan pendidikan yaitu

- a. akumulasi dampak.
- b. hubungan dampak antara yang sesungguhnya terhadap dampak yang hendak dicapai.
- c. kualitas kehidupan.
- d. pembuatan keputusan.
- e. sistem politik.
- f. waktu serta tipe dampak dari kesejahteraan ekonomi (Ripley, 1985).

Kelemahan evaluasi kebijakan pendidikan yaitu:

- a. ketepatan, dapat berguna dari evaluasi pendidikan yang telah dijalankan.
- b. responsivitas, hasil dari kebijakan pendidikan dapat memuat preferensi serta nilai kelompok.
- c. pemerataan, dapat didistribusikan secara merata pada semua kelompok masyarakat.

kecukupan, seberapa jauh hasil yang sudah didapat sehingga mampu menyelesaikan masalah pendidikan (Nugroho, 2009, Subarsono, 2013).

KESIMPULAN

Evaluasi merupakan proses akhir dari proses kebijakan, melaksanakan penilaian, dampak serta penerapan kebijakan, serta perubahan terhadap kebijakan yang sudah diterapkan. Hakikat evaluasi kebijakan pendidikan yaitu alat guna menghimpun serta memproses informasi tentang program atau pelayanan yang diterapkan.

Di dalam evaluasi terdapat kegiatan pelaksanaan kebijakan supaya diketahui apakah kebijakan itu bisa terselenggara secara baik ataukah tidak, mengetahui kekurangan serta keunggulan kebijakan itu, mengetahui seberapa jauh kebijakan itu dilaksanakan, mengetahui akibat yang dimunculkan dari kebijakan itu serta mengetahui langkah berikutnya penanganan kebijakan dirubah atau diperbaiki.

REFERENCES

- Ali, M. (2007). *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Depdiknas. (1998). *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Dunn, William N.,(2003). *Analisa Kebijakan Publik*. (Peny: Muhadjir Darwin). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hogwood, B. W., & Peters, B. (1985). *The Pathology of public policy*. USA: Oxford University Press
- Islamy, Irfan M. (2003). *Prinsi-prinsip perumusan kebijakan negara*, Jakarta: Penerbit bumi aksara.
- Imron, Ali. (2012). *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia (Proses, Produk, dan MasaDepanya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones. (1985). *School Finance: Technique and Social Policy*. London Coller Macmillan Pub. Kawengian, D.D., & Rares, J.J. (2005). *Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak di kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Acta Diurna*, 4(5).
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2003). *Petunjuk Teknik Monitoring Dan Evaluasi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usai Dini, Nonformal Dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research. *Perfusion*, 30(7), 537–542.
- Ripley, R. B. (1985). *Policy Analysis in Political Science*, California: Wadsworth Publishing Company.
- Shi, Yuyan. (2006). *Selecting Evaluation Criteria and Evaluating Policy*, San Diego: University of California.
- Stewart, Jr, J., Hedge, D., & Lester, J. P. (2007). *Publik Policy: An Evalutionary Approach*. Nelson Education.
- Stufflebeam. (1985). *Systematic Evaluation*, Bostom: Kluwer Nijhof Publishing. Supandi, Ahmad Sanusi. (1988). *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*, Jakarta: P2LPTK
- Wirawan. (2011). *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah

Copyright Holder :

© Ika Widiastuti, Pandu Adi Cakranegara., (2023).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

